

DAFTAR PUSTAKA

- Agusniar, A. 2006. *Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perekonomian Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat Aceh Singkil*. Institut Pertanian Bogor: Program Pasca Sarjana.
- Arsyad, Lincoln. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Bayo, Andre. 2007. *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Boediono. 1985. *Ekonomi Makro, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi*. Catatan keempat. Yogyakarta: BPFE.
- Darise, Nurlan. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks.
- Efendi, Jaenal dan Ditta Wardani. 2016. *Debt Financing dan Dampaknya terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Bogor*. Jurnal Al-Muzara'ah. Hal.119.
- Gregory, Mankiw. 2006. *Pengantar Ekonomi Makro*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Irawan, M. Suparmoko. 1979. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM.
- J. Kaloh. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Kansil, Christine. 2001. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kuncoro, M. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: PT. Erlangga.
- Kuncoro, Muddarajad. 2006. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: STIM YKPM
- L. M. Jhingan. 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Lumbessy, K. 2005. *Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perkembangan Perekonomian Wilayah dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Buru*. Institut Pertanian Bogor: Program Pasca Sarjana.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Erlangga.
- Mahsun, Mohamad. 2011. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPF.
- Partadinaredja, Ace. 1982. *Perhitungan Pendapatan Nasional*. Jakarta: LP3ES.
- Phratama, Raharja. 2008. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi)*. Edisi Ketiga. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rahmatina, Aulia. 2010. *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2005 – 2009*. Institut Manajemen Telkom Bandung: Program Pasca Sarjana.
- Rahmawati, Y. I. *Analisis Faktor-faktor Mempengaruhi Kemiskinan*. Diakses melalui laman <https://sarulmardianto.wordpress.com>. Pada 20 September 2019. Pukul 20.00 WIB.
- Renggapratiwi, A. 2009. *Kemiskinan Dalam Perkembangan Kota Semarang: Karakteristik dan Respon Kebijakan*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Roeslan, Zaris. 1987. *Prespektif Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: LPFE UI.
- Saragih, J.P. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soesastro, Hadi. 2005. *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2007. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan Bima Grafika.
- _____. 1994. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Catatan Kedua. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2000. *Makroekonomi Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryawati, C. 2005. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan. Hal.87.
- Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, M. P. Dan Stephen C. S. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Kedelapan. Jakarta: PT. Erlangga.
- Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000. Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis. 2019. *Penduduk Miskin*. Ciamis: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2010. *Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana bagi Masyarakat Miskin (Keluarga prasejahtera/ KPS dan Keluarga Sejahtera-1/KS-1)*. Jakarta: Bappenas.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Tentang Otonomi Daerah.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2000. Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

